

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

NENA NURHASANAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum baiknya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cimindi. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya, kemudian masyarakat juga cenderung mengandalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan sumber daya alam yang ada belum optimal dimanfaatkan dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat masih minim.

Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 30 orang, (Kepala Desa 1 orang, Kepala Dusun 9 orang, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1 orang, anggota kelompok tani 10 orang, anggota perempuan tani 1 orang, dan anggota kelompok usaha 8 orang). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik triangulasi, yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan verifikasi yang diinterpretasikan secara kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 4 dimensi yang diteliti, hanya 1 dimensi yang sudah cukup baik dilakukan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Cimindi adalah bahwa terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal, mencakup dari dana yang di butuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak kunjung turun, dan sumber daya perangkat desa yang masih kurang untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, dan faktor eksternal yaitu masyarakatnya sendiri yang memang kurang begitu antusias untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, diantaranya karena faktor usia. Sementara itu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu melakukan berbagai perencanaan dan memasukan kegiatan tersebut kedalam agenda tahunan seperti RAPBDes yang akan dilakukan dalam jangka satu tahun ke depan, Pemerintah Desa juga melakukan sosialisasi dengan menyempatkan untuk datang langsung ke setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, masyarakat*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2014: 114) harus meliputi beberapa upaya pokok diantaranya:

1. Bina kemanusiaan, 2. Bina Usaha, 3. Bina Lingkungan, 4. Bina Lembaga, begitu juga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah: Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian ke tiga paragraf 1 Pasal 126 tentang pemberdayaan masyarakat: 1). Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. 2). Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga 3). Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUMDesa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa,

dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pemberdayaan Masyarakat khususnya bagi masyarakat desa sangat perlu dilakukan, hal ini dikarenakan meningkat atau menurunnya kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan dari kemampuan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat mampu untuk mengatur hidupnya sendiri dan memiliki daya guna bagi keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan peninjauan awal diketahui masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan oleh Pemerintah Desa, dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Terbatasnya kapasitas individu sumberdaya manusia yang berada di Desa Cimindi dalam menerima segala materi pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan Pemerintah Desa sehingga mengakibatkan kurang berjalanya proses pemberdayaan yang dilakukan.
2. Terdapat beberapa usaha kecil rumahan yang berada di Desa Cimindi namun keberlangsungan usaha kecil tersebut hanya terjadi beberapa saat saja.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perekonomian masyarakat, dimana masih ada usaha kecil yang menggunakan peralatan tradisional untuk melakukan produksinya.
4. Koperasi sebagai salah satu lembaga yang mendukung keberlangsungan usaha kecil dan pertanian yang berada di Desa Cimindi, dalam segi peminjaman modal, belum dimanfaatkan secara optimal, dimanahanya sebagian masyarakat yang melakukan peminjaman modal pada koperasi tersebut dan ada beberapa masyarakat yang sulit untuk mengembalikan pinjaman.

II. Tinjauan teoritis

2.1. Pengertian Pelayanan

Istilah pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaan sosialnya dll. (Mardikanto 2015:26).

Secara lebih rinci Slamet (Anwas 2014:49) menekankan bahwa: Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu

membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak secara inisiatif. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia: Pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan atau pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pada bagian lain Subejo dan Supriyanto (Mardikanto 2015: 45) menjelaskan bahwa: pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Menurut Sumodiningrat (dalam Mardikanto dan Soebiato 2015: 52) "pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki". Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang diberdayakan.

Dalam penulisan ini hanya ada satu variabel penelitian yaitu Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian peneliti mengambil upaya pokok setiap Pemberdayaan Masyarakat menurut Mardikanto (2014:113) dengan aspek fokus kajian sebagai berikut:

- a. Bina Manusia dengan indikator:
 - Pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian baik berupa pengetahuan di bidang pertanian, usaha dan lain-lain.
 - Pengembangan mutu sumber daya baik melalui pelatihan rutin maupun penyuluhan.

- b. Bina Usaha dengan indikator:
 - Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya untuk melakukan pengembangan jejaring dan kemitraan.
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha perekonomian masyarakat.
- c. Bina Lingkungan dengan indikator:
 - Melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan agar terjaganya sumberdaya alam yang dimiliki.
 - Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan efektif.
- d. Bina Kelembagaan dengan indikator:
 - Penguatan KUD (Koperasi Unit Desa) untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi atau pertanian.
 - Penguatan BUMDes khususnya yang melaksanakan fungsi perkreditan atau pinjaman modal bagi masyarakat.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat dan utuh dari sifat individu, kelompok, keadaan dan gejala lain dalam suatu masyarakat serta berusaha untuk menganalisis data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Mayer dan Greenwood (dalam Silalahi, 2012: 27) mengemukakan “penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa”. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Deskripsi seperti ini melambangkan tahap permulaan dari perkembangan suatu disiplin.

Subyek penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kelompok masyarakat tani, Kelompok perempuan tani, Kelompok usaha, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dengan jumlah informan sebanyak 30 orang.

Kemudian sejumlah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara langsung. Analisis dilakukan dengan logika “induktif-abstraktif” dengan mengacu pada konsep Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) yang disebut dengan *interactive model* yang terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan pada hasil penulisan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur harus memperhatikan upaya pokok pemberdayaan masyarakat yang di kemukakan oleh Mardikanto 2015: 114 ialah sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Berdasarkan penelitian pelaksanaan bina manusia yang dilakukan oleh pemerintah bahwa memang kegiatan itu belum cukup baik dilakukan karena masyarakat di Desa Cimindi masih sangat minim pengetahuannya dalam upaya untuk meningkatkan daya guna bagi kehidupannya.

2. Bina usaha

Berdasarkan hasil penelitian Bina Usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum begitu maksimal hal ini dikarenakan asih kurangnya pengembangan sarana dan prasarana dan pengembangan jejaring kemitraan sebagai jembatan untuk memasarkan hasil produksi masyarakat.

3. Bina Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan oleh Pemerintah Desa bahwa kegiatan itu sudah cukup terlaksana karena sudah dilakukan pada saat ada musyawarah dan pemerintah telah melakukan penanaman bibit pohon untuk memberikan contoh kepada masyarakat.

4. Bina kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan bina kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran belum cukup baik, dikatakan demikian karena keberadaan BUMDes belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik, seperti fungsi perkreditan dan permodalan yang seharusnya bisa memberikan kemudahan dari segi keuangan untuk masyarakat,

kemudian dari fungsi KUD sendiri juga belum cukup baik dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola KUD tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjalankan KUD dengan baik.

4.2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur.

Untuk dapat menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur, penulis mengacu kedalam empat dimensi dalam upaya pokok pemberdayaan, namun terdapat dimensi yang belum berjalan dengan baik sehingga menemukan hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian baik berupa pengetahuan di bidang pertanian, usaha dan lain – lain.
2. Masih rendahnya mutu kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Cimindi.
3. Masih kurangnya pengembangan jejaring dan kemitraan.
4. Sarana dan prasarana pendukung usaha perekonomian masyarakat belum didapatkan secara merata.
5. Pelestarian lingkungan masih jarang dilakukan
6. Masyarakat belum memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan efektif.
7. KUD (Koperasi Unit Desa) belum mampu untuk menjalankan fungsi perkreditan.
8. Perkreditan atau pinjaman modal yang diselenggarakan oleh BUMDes belum dimanfaatkan dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu masih kurangnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok, belum maksimalnya pengembangan jejaring dan kemitraan, dan kurang maksimalnya fungsi kelembagaan BUMDes dalam bidang perkreditan dan permodalan.

4.3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur.

Untuk dapat menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur, penulis mengacu kedalam empat dimensi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan berdasarkan hambatan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan pengembangan kapasitas individu dengan cara yang tepat seperti mengadakan pengajian dan musyawarah.
2. Dengan memasukkan kegiatan pengembangan kualitas mutu sumber daya manusia yang dimiliki kedalam agenda rutin yang dilakukan seperti Rancangan Anggaran Pembelanjaan Desa agar bisa berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Pemerintah desa merencanakan akan melakukan pelatihan kepada Perangkat Desa agar memiliki kemampuan dalam membangun jejaring kemitraan yang memang sangat dibutuhkan.
4. Meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah atau agar bisa bekerja sama dalam memenuhi saran dan prasarana yang diperlukan.
5. Pemerintah Desa melakukan penanaman bibit-bibit pohon di lahan-lahan yang memang diperlukan penanaman.
6. Pemberian pengetahuan oleh Pemerintah Desa dilakukan disela sela acara besar yang diadakan oleh masyarakat setempat.
7. Pemerintah Desa melakukan pemberian pengetahuan kepada anggota KUD agar menjalankan fungsinya dengan lebih optimal.
8. Untuk BUMDes Pemerintah Desa melakukan pengaturan ulang pegawai di dalamnya agar menghindari penyelewengan yang sebelumnya pernah terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Cimindi adalah dengan melakukan berbagai

perencanaan untuk melakukan pelatihan maupun penyuluhan dan pemberian pengetahuan kepada masyarakat agar mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya guna.

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran mengenai "Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran". Maka dapat penulis simpulkan sebagaimana berikut ini:

1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan mampu untuk mengatur kehidupannya sendiri dan mampu untuk menentukan tujuan dan masa depan hidupnya, memang belum dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa. Masih kurang maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan tersebut dikarenakan dalam segi kesiapan Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan tersebut, misalnya dalam melakukan pembinaan dan pelatihan masih sedikit kegiatan yang di lakukan, sehingga hal itu belum bisa terealisasi dengan baik. Begitu pula hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Pemerintah Desa memang kurang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap kegiatan pemberdayaan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur diantaranya: 1). Pemerintah masih kurang untuk melakukan setiap kegiatan pemberdayaan, 2). Rendahnya mutu sumber daya masyarakat, 3). Kurangnya pengembangan jejaring kemitraan, 4). Kurang meratanya sarana dan prasarana pendukung perekonomian, 5). Masih kurangnya kegiatan pelestarian lingkungan, 6). Sumber daya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dengan baik, 7). Fungsi perkreditan KUD belum berjalan, 8). Perkreditan dan permodalan belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Diantaranya yaitu: 1) Pemerintah melakukan perencanaan, 2) Memasukan kegiatan pemberdayaan kedalam anggaran pembelanjaan desa, 3) Memberikan pelatihan kepada perangkat desa, 4) Menjalin komunikasi yang lebih baik, 5) Melakukan penanaman bibit pohon, 6) Pemberian pengetahuan dalam sela kegiatan masyarakat, 7) Pemberian pengetahuan kepada anggota KUD, 8) Pemerintah melakukan pengaturan ulang keanggotaan BUMDes.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur, diharapkan Perangkat Desa memiliki kemampuan dalam setiap bidang kegiatan pemberdayaan, Hal itu penting dilakukan sebagai suatu dasar pengetahuan yang mesti dimiliki untuk melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang di temui dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri diharapkan Pemerintah Desa untuk mengembangkan jejaring kemitraan dan menambah sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat.
3. Pemerintah Desa sebaiknya meningkatkan lagi komunikasi dan pelatihan kepada masyarakat agar kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: CV Alfabeta
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sholeh, Chabib. 2014. *Dealetika Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Fokusmedia.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Unpar Pers.

Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

A. Dokumen Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

IDENTITAS PENULIS

Nena Nurhasanah, Tempat Tanggal Lahir: Ciamis, 10 Oktober 1994, Alamat Rumah: Dusun Cirawa, RT/RW 002/005 Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alamat e-mail: nenacms2015@gmail.com. Tercatat sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.